

## **ABSTRAC**

### **Reiska Ragamawarni Nur Kusdinar: Implementation of Policy for Civil Servant Pension Determination and Widows at PT. TASPEN (Persero) Bandung Main Branch Office in 2018**

*The Pension Principal Determination of Civil Servants and Widows / Widower is one of the policies that has been well realized but in practical management of pension funds is not directed in a sustainable manner, where the pension program is managed by the pay as you go system cause the accumulation of funding funds is very dependent on the budget allocated every year in the APBN. If this practice is maintained and continues, then the PNS funds that have accumulated in PT TASPEN will continue to shrink and run out. This causes the payment of pension funds for civil servants to be 100 percent dependent on the state budget, which of course will always burden the country's finances.*

*This study uses a qualitative method with a descriptive approach. To collect the required data, researchers obtained primary data by interviewing techniques. The informants chosen were the Head of General and HR Division, Head of Finance, Head of Services and Benefits, General Staff and Human Resources expert staff, Service and Benefit expert staff, Financial expert staff and three retired civil servants at PT. TASPEN (Persero) KCU Bandung.*

*The results of this study that for retirement benefits using PPMP is changed to a Defined Contribution Pension Program (PPIP) or a fully funded system where employees can target the pension benefits to be received. The funding of the PNS pension program will be built to enable the formation of accumulated funds to maintain the continuity of income of retired civil servants because the system is fully funded with the PNS to pay contributions accumulated in one fund where payment of contributions by the government takes place as long as civil servants are actively working. When PNS enters retirement, the payment of government contributions and civil servants is terminated, pension payments come from funds which are the result of accumulation of contributions from civil servants and the government.*

**Keywords: Pension, civil servants, pay as you go system, pension funds.**

## ABSTRAK

### **Reiska Ragamawarni Nur Kusdinar : Implementasi Kebijakan Penetapan Pensiun Pokok PNS dan Janda/duda Pada PT.TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung Tahun 2018**

Penetapan Pokok Pensiun PNS dan Janda/duda merupakan salah satu kebijakan yang sudah di realisasikan dengan baik tetapi dalam praktis pengelolaan dana pensiun tidak diarahkan secara berkelanjutan, dimana program tunjangan pensiun dikelola dengan sistem *pay as you go* yang menyebabkan akumulasi pembiayaan dana sangat tergantung pada budget yang dialokasikan setiap tahun di APBN. Bila praktek seperti ini dipertahankan dan terus berjalan, maka dana PNS yang sudah terakumulasi di PT TASPEN akan terus menyusut dan habis. Hal ini menyebabkan pembayaran pensiun PNS nantinya 100 persen akan tergantung pada APBN yang tentunya akan selalu membebani keuangan negara.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, peneliti mendapatkan data primer dengan teknik wawancara. Informan yang dipilih adalah Kepala Bidang Umum dan SDM, Kepala Bidang Keuangan, Kepala Bidang Layanan dan Manfaat, Staff ahli Bidang Umum dan SDM, Staff ahli Layanan dan Manfaat, Staff ahli keuangan dan tiga pensiunan PNS di PT.TASPEN (persero) KCU Bandung.

Hasil penelitian ini bahwa untuk tunjangan pensiun menggunakan PPMP dirubah menjadi Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) atau *system fully funded* dimana pegawai dapat membuat target manfaat pensiun yang akan diterima. Pendanaan program pensiun PNS ini akan dibangun untuk memungkinkan terbentuknya akumulasi dana guna memelihara kesinambungan penghasilan pensiunan PNS karena *system fully funded* pemerintah bersama PNS membayar iuran yang diakumulasikan dalam satu dana dimana pembayaran iuran oleh pemerintah berlangsung selama PNS masih aktif bekerja. Pada saat PNS memasuki masa pensiun pembayaran iuran pemerintah dan PNS tersebut di hentikan maka pembayaran pensiun bersumber dari dana yang merupakan hasil penumpukan iuran PNS dan pemerintah.

**Kata kunci : Pensiun, PNS, sistem *pay as you go*, dana pensiun.**